

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Interpretation)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- Badruzaman, Mariam. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standar)*. Bandung: Alumni, 1994.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 8th ed. West St. Paul, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, Sunaryati. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaruan Hukum Tanah*. Bandung: Alumni, 1978.
- . *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Cet. II. Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Cet. 9. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Cet. Kelima. Jakarta: Tintamas, 1983.
- Herdhyaksa, Bagas. *Hak Waris dalam Hukum Acara Perdata*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Universitas Terbuka, Karunika, 1988.

- . *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1992.
- Mustofa, Bachsan. *Hukum Agraria dalam Perspektif*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Parlindungan, A.P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Diterjemahkan oleh Isa Arief. Jakarta: Intermedia, 1979.
- Poesponoto, K.N.G. Soebakti. *Azas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita, 1960.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramulyo, H.M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- . *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- . *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dan Hukum Waris*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Universitas, 1966.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1984.
- . *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1985.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXXIII. Jakarta: Intermedia, 2008.

Sumardjono, Maria S.W. *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*. Jakarta: Kompas, 2007.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Cet. III. Bandung: Mandar Maju, 1995.

———. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2022.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

ARTIKEL JURNAL

Assa, Marybella Natasha. “Kajian Tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah terhadap Etnis Tionghoa Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020).

Fitriani. “Perjanjian Nominee dalam Investasi Asing Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 3 (2020): 377–392.

Hetharie, Yosia. “Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Sasi* 25, no. 1 (2019): 27–36.

Irianto, Sulistyowati. “Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 32, no. 2 (2002): 159.

Maulana, Afan Husni. “Larangan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta Perspektif Hukum Positif.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021).

Mullen, Elizabeth. “Compensatory Justice.” In *The Oxford Handbook of Justice in the Workplace*, edited by Russell Cropanzano and Maureen L. Ambrose, 257–274. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Murni, Christiana Sri. “Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020).

Nugroho, Adityo. “Keabsahan Surat Edaran Gubernur DIY PA. VIII/No. K.898/I/A/1975 Mengenai Pelepasan Hak Atas Tanah.” *Diversi Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Desember 2019): 143–166.

Ramadina, Mutia, dan Pieter E. Latumeten. “Praktik Nominee dalam Pranata Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5461–5467.

Tauda, Gunawan A. “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 413–435.

Wijaya, I Gede Krisna Wahyu, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online.” *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 8 (2018).

Yasin, Muhammad. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Transaksi Efek untuk Perlindungan Investor.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 1 (2021): 57–68.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak atas Tanah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Yogyakarta.

Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/75 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Warga Negara Indonesia Nonpribumi.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Smn, 4 April 2019

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 82/PDT/2019/PT YYK, 12 September 2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2006 K/Pdt/2020, 26 Agustus 2020

HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Carmelia Wirawan, Clarina. “Kepastian Hukum Perjanjian Nominee terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS dan Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.DPS).” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018.

INTERNET

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. “Sejarah Yogyakarta.” *Teras Malioboro*, 11 Agustus 2022. <https://teras malioboro.jogjapro.go.id/2022/08/11/sejarah-yogyakarta/>.